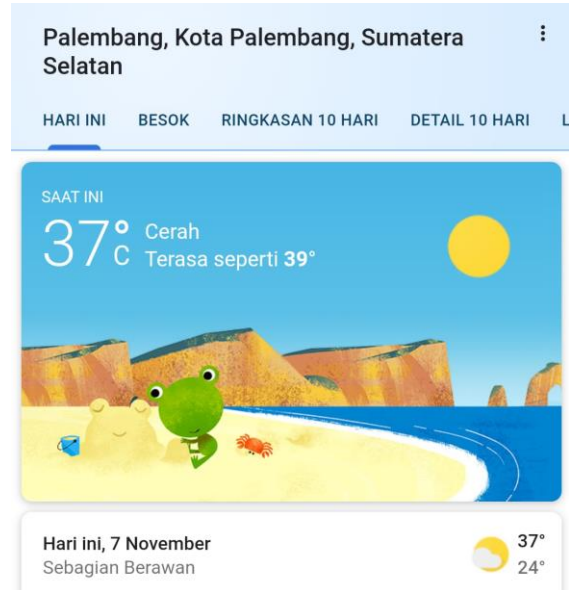


TENTANG PERUBAHAN IKLIM

Korelasi Perencanaan Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan Mengusung Pembangunan Rendah Karbon

Oleh : D. A. Nando

Ancaman perubahan iklim di Tahun 2019 semakin nyata kita rasakan dipengaruhi oleh kemampuan Bumi untuk menopang peradaban manusia semakin berkurang. Naiknya suhu planet beberapa dekade terakhir menjadi bukti bahwa Bumi sedang tidak baik-baik saja. Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) dalam perhelatan COP25 menyebut 2019 sebagai salah satu tahun terpanas sepanjang dekade. Terjadi kenaikan suhu global di tahun ini sebesar 1,1 derajat Celsius. Penyebabnya menurut para ahli disebabkan oleh produksi karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, dan gas rumah kaca lainnya secara berlebihan¹.



WALHI Sumatera Selatan mencatat pada tahun 2019 ini suhu udara terpanas di Sumatera Selatan mencapai kisaran 37 derajat Celsius.

Akibat naiknya suhu planet yang hanya 1 derajat Celsius tersebut berdampak pada cuaca ekstrem serta kerusakan ekosistem. Beberapa peristiwa besar yang bisa dilihat belakangan di Indonesia khususnya di Sumatera Selatan antara lain banjir, longsor, maupun angin puting beliung yang terjadi pada awal dan penghujung tahun 2019 di Kabupaten Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, PALI dan Kota Palembang. Kebakaran hutan lahan yang mengakibatkan kabut asap juga kembali terjadi dari Juli hingga awal November 2019 dipicu oleh kemarau panjang dan kekeringan.

Isu mengenai lingkungan hidup terutama perubahan iklim selama ini banyak disuarakan secara global, nasional hingga daerah. Bahkan di Provinsi Sumatera Selatan juga sudah mempunyai Rencana Aksi Daerah (RAD) Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Sumatera

¹ Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) melaporkan sepanjang 2015-2019, bumi memanas 0,2 derajat Celsius dibanding 2011-2015. Gas rumah kaca terakumulasi dan terperangkap di atmosfer bumi menambah suhu hingga 1,1 derajat Celsius dibanding masa Pra Industri Tahun 1850. Sementara Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan anomali suhu udara 0,39 derajat Celsius dari tahun 2018 ke tahun 2019.

Selatan Tahun 2010 sampai dengan 2030 untuk mendukung komitmen pemerintah pusat mengurangi emisi karbon hingga 29% di Tahun 2030. Melihat intensitas bencana ekologis yang masih saja terjadi di sepanjang Tahun 2019 menjadi sorotan publik terkait kebijakan pemerintah selama ini dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Bukti “Suram” di balik warisan kebijakan “Green Growth”

Salah kaprah mengartikan *Green Growth* atau Pertumbuhan Ekonomi Hijau menyisakan persoalan menahun dan kronis di Sumatera Selatan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat, ramah lingkungan, serta inklusif secara sosial berganti dengan ekstraksi sumber daya alam dan bertumpu pada korporasi namun mengabaikan hak lingkungan serta kelompok rentan. Akhirnya sampai pada Tahun 2019 konflik tenurial serta bencana ekologis masih terjadi. Perubahan fungsi kawasan dan perluasan perkebunan kelapa sawit dan kebun kayu di kawasan gambut dan hutan pada tahun-tahun sebelumnya bertanggungjawab atas pemicu perubahan iklim di tahun ini.

Sumatera Selatan Rentan

Dampak perubahan iklim di Provinsi Sumatera Selatan, karena kerentanannya bisa sangat besar sebagai bagian dari negara tropis, Indonesia, dengan banyak pulau-pulau kecil. Ada 23 pulau-pulau kecil yang berada di Sumatera Selatan. Perubahan iklim yang menyebabkan perubahan tinggi permukaan laut, tentu akan mengancam tenggelamnya wilayah-wilayah pesisir baik berpenduduk atau tidak. Slogan

Nama Pulau Kecil	Kabupaten	Elevasi (mdpl)
Pulau Betet	Banyuasin	-1
Pulau Burung	Banyuasin	0
Pulau Gundul	Banyuasin	-3
Pulau Kalong	Banyuasin	2
Pulau Kramat	Banyuasin	3
Pulau Salahnamo	Banyuasin	2

WALHI Sumatera Selatan menilai jika tidak ada upaya ambisius dalam upaya mitigasi perubahan iklim, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terancam akan tenggelam.

“Lumbung Energi dan Lumbung Pangan” terkait dengan masih ketergantungan Provinsi Sumatera Selatan dengan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi dan gas alam juga turut mendorong laju pelepasan emisi gas rumah kaca. Pada sektor pertanian ketergantungan pupuk kimia akan mengakibatkan terjadinya penurunan muka tanah, sedimentasi serta kerusakan DAS. Begitu juga dengan pengambilan air tanah berlebihan untuk industri. Hal inilah salah satu faktor yang cukup signifikan penyebab terjadinya banjir di Sumatera Selatan, selain faktor alih fungsi kawasan dan tidak cermat tata ruang.

Sumatera Selatan memiliki 1,2 juta Hektare luas lahan gambut. Peran gambut terkait isu pemanasan global sangat penting karena fungsinya sebagai penyimpan karbon. Namun dengan terjadinya kekeringan pada lahan gambut karena drainase, konversi, dan pembalakan hingga terjadi kebakaran mengakibatkan kerusakan fungsi gambut. Luas kebakaran hutan dan lahan di tahun 2019 tercatat sebesar 361.889 Hektare, dari luasan itu 60,93 persennya atau 240.483 Hektare luas kebakaran terjadi di ekosistem gambut.

2019, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Disahkan

Selama ini percepatan pembangunan berbanding lurus dengan kerusakan lingkungan hidup. Isu mengenai lingkungan hidup tak dapat disepelekan lagi dan pasti berpengaruh pada keberlangsungan hidup manusia. Misalnya saja pola cuaca yang tak menentu akan berdampak pada gagal panen yang akhirnya mengakibatkan krisis pangan. Bukan hanya sekedar perut lapar, meningkatnya laju deforestasi dan krisis air bersih, jika tidak ada penanganan ambisius dan berkelanjutan dalam menghadapi perubahan iklim sudah pasti akan berpengaruh pada penghasilan masyarakat dan jatuhnya perekonomian daerah.

Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 yang disahkan pada Tahun 2019 harus terkait pada pembangunan rendah karbon. Konsep Pembangunan Rendah Karbon menjadi upaya berkelanjutan untuk mengerem laju perubahan iklim². Hal ini harus diselaraskan antara tujuan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah tentunya. Pada tahun 2020 semua daerah juga melakukan perubahan RPJMD untuk menyesuaikan dengan RPJMN yang baru, termasuk Provinsi Sumatera Selatan.

Sekali lagi pada tahun 2019 mendapat sorotan publik terkait upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Terobosan positif dan langkah konstruktif menjadi harapan untuk mengerem laju bencana ekologis. Kebijakan itu diperlukan untuk merawat planet ini agar mampu bertahan hingga generasi mendatang.

² Pemerintah Pusat mengangkat isu pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim. Hal tersebut diarahkan melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, serta Pembangunan Rendah Karbon.